



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Winarto
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teguh
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Teguh

Pihak Pertama,

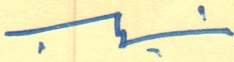
Budi Winarto

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 1.153.000.000 <i>(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)</i>
2	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp - (-)
	Jumlah	Rp 1.153.000.000 <i>(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)</i>

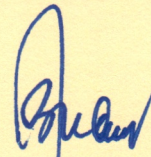
Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,



Teguh

Pihak Pertama,



Budi Winarto



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Budi Winarto**, Jabatan **Inspektur IV**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Oktober 2025

Menyaksikan:
Inspektur Jenderal

Teguh

Pembuat Pernyataan

Budi Winarto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV**

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 50	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan berkualitas	ISK 50.4	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat IV	70	Persentase (%)
SK 51	Meningkatnya tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal	ISK 51.4	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat IV	70	Persentase (%)
SK 53	Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan Internal	ISK 53.4	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat IV	60	Persentase (%)
SK 55	Meningkatnya capaian implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RARB)	ISK 55.2	Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP Kementerian	17,2	Nilai
SK 57	Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan	ISK 57.1	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi Kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti	85	Persentase (%)